



KINERJA KEUANGAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA: ANALISIS RASIO EFEKTIVITAS DAN PERTUMBUHAN DI DESA HESANG, KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Vijay Krestopher Saselah¹; Monalisa Frilianti Tatimu²; Gracelda Magensih³; Vegalis Makamea⁴

¹²³⁴ Akademi Keuangan dan Perbankan GMIST Tahuna, Sulawesi Utara, Indonesia

ABSTRAK

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) membutuhkan kemampuan pemerintah desa untuk merealisasikan anggaran secara tepat sekaligus menjaga kesinambungan pendapatan dan belanja antartahun. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja keuangan pengelolaan ADD pada Pemerintah Desa Hesang, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selama periode 2019-2022. Penelitian menggunakan desain kuantitatif deskriptif dengan data sekunder berupa dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta laporan realisasi ADD. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan rasio efektivitas, rasio pertumbuhan pendapatan, dan rasio pertumbuhan belanja. Hasil penelitian menunjukkan rasio efektivitas meningkat secara konsisten, yaitu 78,23% pada 2019, 86,07% pada 2020, 92,54% pada 2021, dan 99,72% pada 2022. Rata-rata efektivitas tahunan sebesar 89,14% berada pada kategori cukup efektif berdasarkan kriteria yang digunakan, sedangkan efektivitas agregat empat tahun mencapai 89,63%. Selisih anggaran dan realisasi menurun tajam dari Rp203.369.000 pada 2019 menjadi Rp2.814.050 pada 2022, yang menunjukkan perbaikan penyerapan anggaran. Rasio pertumbuhan pendapatan masing-masing sebesar 2,86%, 47,69%, dan -30,48% pada 2020-2022, sedangkan pertumbuhan belanja sebesar 13,17%, 58,82%, dan -25,09%. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa perbaikan efektivitas tidak selalu disertai pertumbuhan anggaran yang stabil. Pemerintah desa perlu mempertahankan ketepatan realisasi, memperkuat perencanaan berbasis kebutuhan, serta mengembangkan sumber pendapatan desa melalui BUM Desa agar kinerja keuangan lebih berkelanjutan.

Kata kunci: Alokasi Dana Desa; kinerja keuangan; rasio efektivitas; rasio pertumbuhan; pemerintah desa

1. PENDAHULUAN

Desentralisasi pemerintahan menempatkan desa sebagai unit pemerintahan yang memiliki ruang lebih luas untuk merencanakan pembangunan, memberikan pelayanan publik, dan memberdayakan masyarakat sesuai kebutuhan lokal. Kewenangan tersebut diikuti oleh peningkatan sumber pembiayaan yang harus dikelola secara tertib, transparan, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi salah satu instrumen fiskal penting karena mendukung operasional pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan kegiatan pemberdayaan. Besarnya peran ADD menyebabkan kualitas pengelolaannya tidak dapat dinilai hanya dari tersedianya anggaran, tetapi juga dari kemampuan pemerintah desa mengubah rencana anggaran menjadi realisasi program yang relevan bagi masyarakat.

Kinerja keuangan desa mencerminkan kapasitas pemerintah desa dalam merencanakan, menggunakan, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan sumber daya keuangan. Pengukuran kinerja diperlukan agar pemerintah desa dapat mengetahui apakah target yang ditetapkan telah dicapai, mengidentifikasi selisih antara anggaran dan realisasi, serta menilai arah perubahan keuangan dari satu periode ke periode berikutnya. Fahmi (2014) memandang kinerja sebagai hasil yang dicapai organisasi dalam suatu periode, sedangkan Jumingan (2014) menekankan bahwa analisis keuangan mencakup proses meninjau data, menghitung, membandingkan, menginterpretasikan, dan merumuskan solusi. Dengan demikian, analisis kinerja keuangan desa tidak berhenti pada perhitungan angka, tetapi harus menghasilkan penjelasan mengenai kemampuan organisasi publik dalam mencapai tujuan pelayanan dan pembangunan.

Kebutuhan terhadap evaluasi tersebut semakin penting karena pengelolaan keuangan desa berhadapan dengan dua tuntutan sekaligus. Pertama, pemerintah desa harus mampu menyerap anggaran sesuai rencana agar program tidak tertunda dan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi. Kedua, pemerintah desa perlu menjaga konsistensi pendapatan dan belanja agar keberlanjutan program tidak bergantung pada perubahan anggaran yang terlalu tajam. Ketidaktepatan realisasi dapat menimbulkan sisa anggaran yang besar, keterlambatan kegiatan, dan berkurangnya manfaat yang diterima masyarakat. Sebaliknya, realisasi yang mendekati anggaran menunjukkan kemampuan administrasi dan pelaksanaan yang semakin baik, meskipun pencapaian tersebut tetap perlu dilihat bersama kualitas program dan hasil pembangunan.

Kepercayaan masyarakat merupakan dimensi penting dalam pengelolaan keuangan desa. Masyarakat cenderung mempertanyakan pengelolaan anggaran ketika besarnya dana yang tersedia tidak tampak sejalan dengan perubahan pelayanan, infrastruktur, ataupun pemberdayaan ekonomi. Transparansi informasi anggaran, partisipasi dalam musyawarah, dokumentasi pelaksanaan, dan pertanggungjawaban periodik menjadi mekanisme untuk mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah desa dan warga. Apriliana (2017) menempatkan pengelolaan ADD dalam kerangka tata kelola yang baik, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi. Prinsip tersebut selaras dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa yang mengharuskan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dilakukan secara tertib.

Periode 2019-2022 memiliki karakteristik khusus karena mencakup masa sebelum pandemi, periode tekanan pandemi COVID-19, serta tahap penyesuaian dan pemulihan. Pada masa pandemi, pemerintah desa menghadapi perubahan prioritas anggaran, termasuk penyaluran bantuan sosial dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Kondisi tersebut dapat memengaruhi struktur pendapatan, belanja, waktu pelaksanaan kegiatan, dan kemampuan penyerapan. Oleh karena itu, perubahan angka antartahun tidak selalu menunjukkan kelemahan pengelolaan, tetapi dapat pula mencerminkan penyesuaian kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, fluktuasi tetap perlu dianalisis agar diketahui apakah pemerintah desa mampu mempertahankan efektivitas realisasi di tengah perubahan lingkungan kebijakan.

Desa Hesang, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, menjadi objek yang relevan untuk dianalisis karena pemerintah desa mengelola ADD dengan nilai yang berubah selama 2019-2022. Dokumen penelitian menunjukkan bahwa anggaran ADD meningkat dari Rp933.900.000 pada 2019 menjadi Rp960.600.000 pada 2020 dan Rp1.418.755.715 pada 2021, kemudian turun menjadi Rp986.353.000 pada 2022. Pada sisi realisasi, jumlahnya meningkat dari Rp730.531.000 pada 2019 menjadi Rp826.742.000 pada 2020 dan Rp1.312.948.319 pada 2021, lalu turun menjadi Rp983.538.950 pada 2022. Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan penting: apakah penurunan anggaran pada 2022 juga diikuti penurunan kualitas realisasi, atau justru pemerintah desa mampu memperbaiki ketepatan penggunaan dana?

Analisis rasio menjadi salah satu pendekatan yang dapat menjawab pertanyaan tersebut secara terukur. Kasmir (2011) menjelaskan bahwa analisis laporan keuangan membantu pihak yang berkepentingan memahami posisi dan perkembangan keuangan melalui metode perbandingan serta analisis rasio. Dalam penelitian sektor publik, rasio efektivitas digunakan untuk membandingkan realisasi dengan target anggaran. Semakin dekat realisasi terhadap anggaran, semakin tinggi kemampuan organisasi mencapai target keuangannya. Mahsun (2016) mengelompokkan efektivitas ke dalam kategori sangat efektif apabila melebihi 100%, efektif pada rentang 90%-100%, cukup efektif pada 80%-90%, kurang efektif pada 60%-80%, dan tidak efektif apabila kurang dari 60%. Kriteria tersebut memberikan dasar interpretasi yang lebih konsisten dibandingkan sekadar menyatakan bahwa realisasi mengalami kenaikan atau penurunan.

Rasio pertumbuhan melengkapi analisis efektivitas karena menunjukkan arah perubahan pendapatan dan belanja dari tahun sebelumnya. Kasmir (2013) menjelaskan rasio pertumbuhan sebagai

ukuran kemampuan organisasi mempertahankan posisi ekonominya dari satu periode ke periode berikutnya. Dalam pemerintahan daerah, Mutha (2016) menggunakan rasio pertumbuhan untuk menilai kemampuan pemerintah mempertahankan dan meningkatkan capaian keuangan. Pertumbuhan positif menunjukkan kenaikan nilai dibandingkan periode sebelumnya, sedangkan pertumbuhan negatif menunjukkan kontraksi. Namun, pertumbuhan harus diinterpretasikan secara hati-hati. Kenaikan belanja tidak selalu bermakna lebih baik apabila tidak menghasilkan manfaat, dan penurunan belanja tidak selalu buruk apabila terjadi karena perubahan prioritas atau efisiensi. Karena itu, rasio pertumbuhan perlu dibaca bersama rasio efektivitas dan konteks kebijakan.

Penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan analisis rasio pada pemerintah kabupaten atau kota. Fathah (2017), misalnya, menggunakan rasio keuangan untuk menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, sedangkan Ropa (2016) menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Machmud, Kawung, dan Rompas (2014) juga mengevaluasi kinerja keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Penggunaan analisis rasio pada tingkat desa masih relatif terbatas, padahal desa mengelola anggaran yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Penelitian pada Desa Hesang memperluas penerapan analisis tersebut ke tingkat pemerintahan paling dekat dengan warga, khususnya dengan mengombinasikan efektivitas realisasi dan pertumbuhan pendapatan-belanja.

Terdapat pula kebutuhan untuk menilai konsistensi antara data dan kategori hasil. Sebuah rasio dapat meningkat setiap tahun, tetapi rata-ratanya belum tentu masuk kategori efektif. Demikian pula, pendapatan dan belanja dapat meningkat pada dua tahun awal namun mengalami kontraksi pada tahun terakhir. Artikel ini karena itu tidak hanya menyajikan ulang hasil perhitungan, tetapi menafsirkan data berdasarkan kriteria yang digunakan secara konsisten. Pendekatan ini penting agar kesimpulan tidak menyederhanakan dinamika keuangan menjadi sekadar “baik” atau “buruk”, melainkan menunjukkan bagian yang telah membaik dan bagian yang masih memerlukan penguatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja keuangan pengelolaan ADD pada Pemerintah Desa Hesang selama 2019-2022 melalui tiga indikator: rasio efektivitas, rasio pertumbuhan pendapatan, dan rasio pertumbuhan belanja. Secara khusus, penelitian menjawab bagaimana perkembangan kemampuan pemerintah desa merealisasikan anggaran, bagaimana pola perubahan pendapatan dan belanja antartahun, serta apa implikasinya bagi perencanaan dan keberlanjutan pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian diharapkan memberikan bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa Hesang dan menjadi referensi empiris bagi penelitian sejenis pada unit pemerintahan desa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena objek analisis berupa angka-angka keuangan yang bersumber dari dokumen anggaran dan realisasi ADD, sedangkan sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan kinerja keuangan tanpa melakukan pengujian hubungan kausal. Unit analisis penelitian adalah pengelolaan ADD pada Pemerintah Desa Hesang, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian awal dilaksanakan pada Juni-Juli 2023 dengan periode data 2019-2022.

Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, laporan realisasi ADD, serta profil Pemerintah Desa Hesang. Populasi penelitian mencakup seluruh informasi pengelolaan keuangan dan ADD dalam dokumen APB Desa Hesang. Sampel ditetapkan secara purposif pada data anggaran dan realisasi ADD selama empat tahun, yaitu 2019, 2020, 2021, dan 2022. Pemilihan periode tersebut memungkinkan analisis horizontal karena mencakup beberapa tahun anggaran dan memperlihatkan perubahan sebelum, selama, serta setelah fase utama pandemi.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Dokumentasi meliputi penyalinan serta pemeriksaan angka anggaran dan realisasi yang tercantum dalam laporan

keuangan desa. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh konsep kinerja keuangan, pengelolaan ADD, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, dan kriteria interpretasi. Validasi data dilakukan melalui pencocokan antara tabel anggaran, tabel realisasi, serta hasil perhitungan rasio. Setiap angka dihitung kembali untuk meminimalkan kesalahan aritmetika.

Rasio efektivitas dihitung dengan membandingkan realisasi ADD dengan anggaran ADD pada tahun yang sama, menggunakan persamaan: $\text{Rasio Efektivitas} = (\text{Realisasi ADD} / \text{Anggaran ADD}) \times 100\%$. Interpretasi mengacu pada kriteria Mahsun (2016): lebih dari 100% sangat efektif; 90%-100% efektif; 80%-<90% cukup efektif; 60%-<80% kurang efektif; dan kurang dari 60% tidak efektif. Selain rasio tahunan, penelitian menghitung rata-rata aritmetika rasio efektivitas dan efektivitas agregat. Efektivitas agregat diperoleh dengan membagi total realisasi empat tahun dengan total anggaran empat tahun.

Rasio pertumbuhan pendapatan dihitung dengan persamaan: $[(\text{Pendapatan tahun } n - \text{Pendapatan tahun } n-1) / \text{Pendapatan tahun } n-1] \times 100\%$. Rasio pertumbuhan belanja menggunakan formula yang sama dengan mengganti pendapatan menjadi belanja. Tahun 2019 diperlakukan sebagai tahun dasar sehingga rasio pertumbuhan baru dihitung mulai 2020. Nilai positif menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan. Analisis dilengkapi dengan perhitungan selisih anggaran dan realisasi untuk menunjukkan besarnya dana yang belum terealisasi pada setiap tahun.

Tahapan analisis terdiri atas: (1) menyusun data anggaran dan realisasi per tahun; (2) menghitung rasio efektivitas; (3) mengelompokkan hasil berdasarkan kriteria; (4) menghitung pertumbuhan pendapatan dan belanja; (5) membandingkan pola ketiga rasio; dan (6) menginterpretasikan hasil dalam konteks perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan pengelolaan keuangan desa. Analisis tidak menilai kualitas fisik setiap program, kepuasan masyarakat, maupun dampak sosial-ekonomi secara langsung. Oleh karena itu, istilah efektivitas dalam artikel ini dibatasi pada efektivitas keuangan atau tingkat pencapaian realisasi terhadap anggaran.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran pengelolaan keuangan Desa Hesang

Visi Pemerintah Desa Hesang adalah melayani masyarakat secara menyeluruh untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, sehat, dan sejahtera. Misi pemerintah desa mencakup pembangunan berkelanjutan, optimalisasi kinerja perangkat desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, serta pelaksanaan pembangunan yang jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Orientasi tersebut menempatkan pengelolaan keuangan sebagai instrumen untuk mencapai pelayanan dan pembangunan, bukan sebagai tujuan administratif semata.

Secara kelembagaan, pengelolaan keuangan melibatkan kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan umum dan perencanaan, kepala seksi, serta pelaksana kewilayahan. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sementara sekretaris desa membantu administrasi dan koordinasi. Kepala urusan keuangan menangani administrasi pendapatan-pengeluaran, verifikasi, penyusunan APB Desa, inventarisasi data pembangunan, pemantauan program, dan pelaporan. Pembagian fungsi ini menunjukkan bahwa efektivitas realisasi anggaran dipengaruhi oleh koordinasi antarpelaksana, ketepatan dokumen, kesiapan kegiatan, dan kemampuan melakukan pengendalian.

Dalam prinsip pengelolaan keuangan desa, tahap perencanaan seharusnya dimulai dari penggalan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah dusun dan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Tahap pelaksanaan membutuhkan kepatuhan terhadap rencana dan keterbukaan informasi, termasuk penyediaan informasi kegiatan fisik. Tahap pertanggungjawaban mengharuskan

kepala desa menyampaikan laporan secara periodik. Ketiga tahap tersebut saling terkait. Anggaran yang direncanakan tanpa kesiapan teknis berpotensi menghasilkan realisasi rendah, sedangkan pelaksanaan yang baik tanpa dokumentasi memadai dapat mengurangi akuntabilitas.

Perkembangan anggaran dan realisasi ADD

Data menunjukkan bahwa nilai anggaran ADD Desa Hesang mengalami fluktuasi. Anggaran sebesar Rp933.900.000 pada 2019 meningkat Rp26.700.000 atau 2,86% menjadi Rp960.600.000 pada 2020. Pada 2021, anggaran meningkat tajam Rp458.155.715 atau 47,69% menjadi Rp1.418.755.715. Peningkatan tersebut menandakan perluasan kapasitas fiskal atau perubahan kebutuhan pembiayaan desa. Pada 2022, anggaran turun Rp432.402.715 atau 30,48% menjadi Rp986.353.000. Kontraksi ini mengembalikan nilai anggaran mendekati tingkat 2020.

Realisasi ADD mengikuti pola yang serupa, tetapi tingkat perubahannya berbeda. Realisasi sebesar Rp730.531.000 pada 2019 meningkat menjadi Rp826.742.000 pada 2020. Kenaikan Rp96.211.000 menghasilkan pertumbuhan belanja 13,17%, lebih tinggi daripada pertumbuhan anggaran 2,86%. Pada 2021, realisasi meningkat sangat kuat menjadi Rp1.312.948.319 atau tumbuh 58,82%. Pada 2022, realisasi turun menjadi Rp983.538.950 atau berkontraksi 25,09%. Meskipun nilai realisasi turun, penurunannya lebih kecil daripada penurunan anggaran, sehingga tingkat penyerapan justru semakin tinggi.

Selama empat tahun, total anggaran ADD mencapai Rp4.299.608.715 dan total realisasi sebesar Rp3.853.760.269. Dengan demikian, selisih kumulatif mencapai Rp445.848.446 dan efektivitas agregat sebesar 89,63%. Angka agregat memberikan gambaran bahwa hampir sembilan puluh persen anggaran berhasil direalisasikan selama periode penelitian. Namun, agregasi dapat menyembunyikan perbedaan besar antartahun. Karena itu, analisis tahunan diperlukan untuk melihat arah perbaikan.

Tabel 1. Anggaran, Realisasi, Efektivitas, dan Selisih ADD Desa Hesang Tahun 2019-2022

Tahun	Anggaran ADD (Rp)	Realisasi ADD (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria	Selisih (Rp)
2019	933.900.000	730.531.000	78,23	Kurang efektif	203.369.000
2020	960.600.000	826.742.000	86,07	Cukup efektif	133.858.000
2021	1.418.755.715	1.312.948.319	92,54	Efektif	105.807.396
2022	986.353.000	983.538.950	99,72	Efektif	2.814.050
Total/Rata-rata	4.299.608.715	3.853.760.269	89,14*	Cukup efektif	445.848.446

Sumber: APB Desa Hesang 2019-2022, diolah. *Rata-rata aritmetika rasio tahunan; efektivitas agregat total realisasi/total anggaran = 89,63%.

Rasio efektivitas

Rasio efektivitas memperlihatkan peningkatan yang konsisten dari 2019 hingga 2022. Pada 2019, realisasi Rp730.531.000 dibandingkan anggaran Rp933.900.000 menghasilkan rasio 78,23%. Berdasarkan kriteria yang digunakan, nilai tersebut termasuk kurang efektif. Selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp203.369.000 merupakan yang terbesar selama periode penelitian. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian rencana belum dapat dikonversi menjadi pelaksanaan keuangan. Data yang tersedia tidak menjelaskan program mana yang tertunda atau penyebab rinci ketidakrealisasian, sehingga interpretasi harus dibatasi pada rendahnya tingkat penyerapan relatif terhadap tahun lain.

Pada 2020, rasio efektivitas meningkat menjadi 86,07%, dengan realisasi Rp826.742.000 dari anggaran Rp960.600.000. Nilai ini berada pada kategori cukup efektif. Selisih turun menjadi

Rp133.858.000, atau berkurang Rp69.511.000 dibandingkan 2019. Peningkatan tersebut terjadi pada tahun awal pandemi, ketika pemerintah desa juga menghadapi perubahan prioritas dan kebutuhan bantuan masyarakat. Meskipun konteks tersebut berpotensi menimbulkan hambatan, Desa Hesang mampu meningkatkan kedekatan antara realisasi dan anggaran.

Pada 2021, rasio efektivitas mencapai 92,54% dan masuk kategori efektif. Dari anggaran Rp1.418.755.715, pemerintah desa merealisasikan Rp1.312.948.319. Selisih sebesar Rp105.807.396 lebih kecil dibandingkan dua tahun sebelumnya, meskipun nilai anggaran 2021 merupakan yang tertinggi. Hal ini penting karena peningkatan skala anggaran sering memperbesar kompleksitas administrasi dan pelaksanaan. Realisasi di atas sembilan puluh persen menunjukkan bahwa kapasitas pelaksanaan berkembang sejalan dengan kenaikan anggaran.

Pada 2022, rasio efektivitas mencapai 99,72%, yaitu nilai tertinggi dalam periode penelitian. Realisasi Rp983.538.950 hampir sama dengan anggaran Rp986.353.000, dengan selisih hanya Rp2.814.050. Secara keuangan, hasil ini menunjukkan kesesuaian yang sangat tinggi antara rencana dan realisasi. Berdasarkan batas kategori yang digunakan dalam penelitian, 99,72% termasuk efektif, belum sangat efektif karena tidak melampaui 100%. Tingkat penyerapan yang mendekati sempurna perlu dipertahankan, tetapi tetap harus disertai pengujian kualitas output agar realisasi tinggi tidak sekadar menunjukkan habisnya anggaran.

Rata-rata aritmetika rasio efektivitas 2019-2022 adalah 89,14%. Apabila kategori Mahsun (2016) diterapkan secara konsisten, rata-rata tersebut termasuk cukup efektif karena berada pada rentang 80%-<90%. Sementara itu, efektivitas agregat berdasarkan total realisasi terhadap total anggaran adalah 89,63%, yang juga termasuk cukup efektif. Dengan demikian, kesimpulan yang paling tepat adalah bahwa kinerja empat tahun secara keseluruhan cukup efektif, dengan tren perbaikan yang kuat dan pencapaian kategori efektif pada 2021-2022. Interpretasi ini lebih informatif daripada menyebut seluruh periode efektif karena mengakui kelemahan pada 2019 dan posisi transisi pada 2020.

Peningkatan efektivitas dapat dilihat pula dari penurunan selisih anggaran. Persentase selisih terhadap anggaran turun dari 21,77% pada 2019 menjadi 13,93% pada 2020, 7,46% pada 2021, dan hanya 0,28% pada 2022. Pola tersebut menunjukkan perbaikan bertahap dalam ketepatan penganggaran, kesiapan program, pelaksanaan kegiatan, atau administrasi pencairan. Meskipun data tidak memungkinkan identifikasi penyebab dominan, tren yang konsisten memperkuat dugaan bahwa pemerintah desa belajar dari pengalaman tahun sebelumnya dan semakin mampu menyelaraskan perencanaan dengan kapasitas realisasi.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Jumingan (2014) bahwa analisis kinerja keuangan harus menghubungkan perhitungan, perbandingan, dan interpretasi. Angka 99,72% pada 2022 tidak hanya lebih tinggi daripada angka 2019, tetapi menunjukkan perubahan kapasitas organisasi dalam menutup kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan. Dari perspektif akuntabilitas, perbaikan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat apabila didukung oleh keterbukaan informasi mengenai kegiatan, volume pekerjaan, penerima manfaat, dan pertanggungjawaban penggunaan dana.

Namun, efektivitas keuangan memiliki keterbatasan konseptual. Rasio ini tidak menjawab apakah program yang dibiayai merupakan prioritas paling mendesak, apakah kualitas infrastruktur memenuhi standar, atau apakah kegiatan pemberdayaan meningkatkan pendapatan warga. Dua desa dapat memiliki rasio realisasi yang sama, tetapi menghasilkan manfaat berbeda. Oleh sebab itu, efektivitas realisasi harus diposisikan sebagai indikator awal pengelolaan, bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan desa. Penguatan evaluasi ke depan perlu menggabungkan rasio keuangan dengan indikator output, outcome, kepuasan masyarakat, dan pemerataan manfaat.

Tabel 2. Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja ADD Desa Hesang

Tahun	Pendapatan/Anggaran ADD (Rp)	Pertumbuhan Pendapatan (%)	Realisasi Belanja ADD (Rp)	Pertumbuhan Belanja (%)
2019	933.900.000	-	730.531.000	-
2020	960.600.000	2,86	826.742.000	13,17
2021	1.418.755.715	47,69	1.312.948.319	58,82
2022	986.353.000	-30,48	983.538.950	-25,09

Sumber: APB Desa Hesang 2019-2022, diolah.

Rasio pertumbuhan pendapatan ADD

Rasio pertumbuhan pendapatan ADD pada 2020 sebesar 2,86%. Pertumbuhan yang relatif rendah menunjukkan bahwa kapasitas anggaran hanya meningkat sedikit dibandingkan 2019. Meskipun demikian, realisasi belanja tumbuh 13,17%, sehingga pemerintah desa mampu memperkecil selisih antara anggaran dan realisasi. Kombinasi tersebut menunjukkan bahwa perbaikan kinerja 2020 lebih banyak berasal dari peningkatan penyerapan dibandingkan ekspansi anggaran.

Pada 2021, pendapatan ADD tumbuh 47,69%, yaitu peningkatan tertinggi selama periode penelitian. Kenaikan lebih dari empat ratus lima puluh juta rupiah menciptakan peluang untuk memperluas program pembangunan dan pemberdayaan. Pertumbuhan pendapatan yang tinggi dapat meningkatkan kapasitas pelayanan, tetapi sekaligus menuntut kesiapan perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Desa Hesang mampu menjaga efektivitas pada 92,54%, sehingga sebagian besar kenaikan anggaran dapat direalisasikan. Ini merupakan sinyal positif bahwa peningkatan sumber daya diikuti peningkatan kapasitas eksekusi.

Pada 2022, pendapatan ADD turun 30,48%. Penurunan tersebut berarti bahwa ruang fiskal desa dari sumber ADD menyusut dibandingkan 2021. Secara matematis, nilai negatif tidak dapat disebut pertumbuhan positif. Kontraksi ini perlu dibaca dalam konteks perubahan alokasi dan prioritas, tetapi data penelitian tidak memuat sebab kebijakan secara rinci. Yang dapat dipastikan adalah bahwa pemerintah desa menghadapi anggaran lebih kecil. Menariknya, efektivitas justru meningkat menjadi 99,72%. Artinya, meskipun sumber dana berkurang, pemerintah desa mampu menyesuaikan realisasi secara sangat dekat dengan anggaran yang tersedia.

Rata-rata sederhana pertumbuhan pendapatan selama 2020-2022 adalah sekitar 6,69%. Nilai rata-rata positif tersebut harus ditafsirkan hati-hati karena dipengaruhi kenaikan besar pada 2021 dan penurunan besar pada 2022. Pola yang sebenarnya adalah fluktuatif, bukan meningkat secara stabil. Volatilitas ini menunjukkan pentingnya perencanaan skenario. Pemerintah desa tidak sebaiknya menyusun program berkelanjutan dengan asumsi bahwa ADD akan selalu meningkat. Program yang memerlukan pembiayaan tahunan perlu memiliki prioritas jelas, estimasi biaya realistis, dan alternatif pembiayaan.

Rasio pertumbuhan belanja ADD

Pertumbuhan belanja pada 2020 sebesar 13,17%, lebih tinggi daripada pertumbuhan pendapatan 2,86%. Secara nominal, realisasi meningkat dari Rp730.531.000 menjadi Rp826.742.000. Kenaikan belanja yang lebih cepat daripada anggaran menyebabkan tingkat efektivitas meningkat. Dalam konteks pelayanan publik, peningkatan belanja dapat mencerminkan percepatan pelaksanaan program. Namun, tanpa rincian komposisi belanja, penelitian ini tidak dapat menentukan apakah kenaikan terutama terjadi pada bidang pemerintahan, pembangunan, bantuan sosial, atau pemberdayaan.

Pada 2021, pertumbuhan belanja mencapai 58,82%, juga merupakan nilai tertinggi. Belanja meningkat Rp486.206.319 dibandingkan 2020. Pertumbuhan belanja bahkan lebih tinggi daripada pertumbuhan pendapatan, sehingga rasio efektivitas naik dari 86,07% menjadi 92,54%. Kondisi ini

menunjukkan kemampuan pemerintah desa menggunakan tambahan anggaran dalam tahun yang sama. Jika peningkatan tersebut diarahkan pada kebutuhan prioritas dan dilaksanakan secara transparan, maka pertumbuhan belanja dapat mendukung pencapaian visi desa. Akan tetapi, evaluasi manfaat program tetap diperlukan untuk memastikan bahwa peningkatan belanja menghasilkan output yang proporsional.

Pada 2022, belanja turun 25,09%, dari Rp1.312.948.319 menjadi Rp983.538.950. Penurunan belanja lebih kecil daripada penurunan pendapatan 30,48%. Akibatnya, proporsi realisasi terhadap anggaran meningkat tajam. Secara administratif, kondisi tersebut menunjukkan penyesuaian yang efektif terhadap anggaran yang lebih rendah. Namun, penurunan nominal belanja juga dapat berarti berkurangnya kapasitas pembiayaan program. Pemerintah desa perlu memprioritaskan kegiatan dengan manfaat terbesar dan menghindari fragmentasi anggaran ke terlalu banyak kegiatan kecil.

Rata-rata sederhana pertumbuhan belanja 2020-2022 adalah sekitar 15,63%. Seperti pertumbuhan pendapatan, rata-rata ini tidak menggambarkan kestabilan karena rentang nilainya sangat lebar. Pola pertumbuhan belanja dapat diringkas menjadi ekspansi moderat pada 2020, ekspansi kuat pada 2021, dan kontraksi pada 2022. Oleh karena itu, pernyataan bahwa belanja tumbuh positif sepanjang periode tidak sesuai dengan nilai 2022 yang negatif. Kesimpulan yang lebih tepat adalah bahwa belanja meningkat pada 2020-2021, kemudian menurun pada 2022.

Keterkaitan efektivitas dan pertumbuhan

Perbandingan ketiga rasio menghasilkan temuan utama bahwa efektivitas dan pertumbuhan mengukur dimensi berbeda. Efektivitas menjawab seberapa dekat realisasi dengan anggaran, sedangkan pertumbuhan menjawab seberapa besar perubahan nilai dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2021 memiliki pertumbuhan pendapatan dan belanja tertinggi, tetapi efektivitasnya 92,54%. Tahun 2022 mengalami pertumbuhan negatif, tetapi efektivitasnya justru tertinggi sebesar 99,72%. Dengan demikian, penurunan nominal dana tidak identik dengan penurunan kemampuan pengelolaan.

Temuan tersebut memiliki implikasi kebijakan. Pemerintah desa perlu memisahkan evaluasi kapasitas fiskal dari evaluasi kapasitas pelaksanaan. Kapasitas fiskal berkaitan dengan besar kecilnya sumber dana, sedangkan kapasitas pelaksanaan berkaitan dengan kemampuan menggunakan dana sesuai rencana. Ketika anggaran meningkat, fokus pengendalian harus pada kesiapan program agar kenaikan dana tidak memperbesar sisa anggaran. Ketika anggaran menurun, fokus harus bergeser pada prioritas, efisiensi, dan perlindungan program dasar. Desa Hesang menunjukkan perbaikan kapasitas pelaksanaan, tetapi masih menghadapi ketidakstabilan kapasitas fiskal.

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu arah strategis yang dapat dipertimbangkan untuk mengurangi ketergantungan pada transfer. Lili (2018) menekankan peran pengelolaan ADD dalam mendorong pembangunan ekonomi masyarakat. BUM Desa yang dikelola berdasarkan potensi lokal dapat menciptakan pendapatan asli desa, membuka kesempatan kerja, dan menopang program yang bersifat berkelanjutan. Namun, pengembangan BUM Desa harus didasarkan pada studi kelayakan, tata kelola profesional, pemisahan administrasi keuangan, dan mekanisme pengawasan agar tidak menjadi beban baru.

Selain diversifikasi pendapatan, perencanaan perlu menggunakan data kebutuhan dan evaluasi program tahun sebelumnya. Selisih anggaran yang besar pada 2019 dapat menjadi pelajaran untuk meningkatkan ketepatan estimasi waktu, biaya, dan kapasitas pelaksana. Penurunan selisih hingga hampir nol pada 2022 merupakan capaian yang harus dijaga, tetapi target realisasi tidak boleh mendorong belanja terburu-buru menjelang akhir tahun. Jadwal pelaksanaan dan pencairan perlu dipantau secara berkala agar realisasi tersebar secara sehat sepanjang tahun anggaran.

Transparansi juga perlu ditingkatkan dari sekadar penyampaian jumlah anggaran menjadi keterbukaan mengenai hasil. Papan informasi kegiatan, laporan realisasi, forum musyawarah, dan media informasi desa dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dana, kegiatan, output, dan penerima manfaat. Keterbukaan semacam ini membantu masyarakat memahami bahwa fluktuasi

anggaran dapat berasal dari perubahan kebijakan, sekaligus memberi ruang bagi warga untuk menilai kualitas pelaksanaan. Transparansi yang berbasis hasil akan memperkuat akuntabilitas sosial dan mencegah penilaian kinerja hanya berdasarkan besarnya penyerapan.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu dan kontribusi penelitian

Penggunaan rasio efektivitas dalam penelitian ini sejalan dengan Fathah (2017) dan Ropa (2016), yang menempatkan perbandingan realisasi dan target sebagai salah satu indikator kinerja pemerintah. Kesamaan utamanya terletak pada prinsip bahwa kinerja keuangan sektor publik harus dinilai melalui data anggaran dan realisasi. Perbedaannya, penelitian ini diterapkan pada pemerintah desa dengan skala anggaran dan struktur organisasi yang lebih kecil. Pada tingkat desa, perubahan angka dapat lebih langsung berhubungan dengan kesiapan kegiatan lokal dan kapasitas aparatur.

Studi Machmud et al. (2014) dan Mutiha (2016) menunjukkan pentingnya analisis tren antartahun dalam menilai keuangan daerah. Artikel ini memperkuat argumen tersebut dengan memperlihatkan bahwa satu rasio saja dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak lengkap. Apabila hanya menggunakan rasio pertumbuhan, 2022 dapat dinilai buruk karena pendapatan dan belanja menurun. Apabila hanya menggunakan efektivitas, 2022 tampak sebagai tahun terbaik. Kombinasi keduanya menghasilkan penjelasan yang lebih seimbang: kapasitas dana menurun, tetapi ketepatan realisasi membaik.

Kontribusi empiris penelitian ini adalah penyediaan gambaran kinerja keuangan ADD pada Desa Hesang selama empat tahun. Kontribusi analitisnya adalah penegasan mengenai perlunya konsistensi kategori dan pemisahan antara pertumbuhan nominal dengan efektivitas penyerapan. Artikel ini juga menunjukkan nilai tambah perhitungan selisih anggaran, rata-rata efektivitas, dan efektivitas agregat. Ukuran tambahan tersebut membantu pembaca memahami seberapa besar perbaikan yang terjadi dan mengurangi risiko kesimpulan yang hanya didasarkan pada satu tahun.

Keterbatasan penelitian perlu diperhatikan. Pertama, analisis hanya menggunakan dua kelompok rasio sehingga belum mencakup efisiensi, kemandirian, keserasian belanja, varians, dan nilai manfaat. Kedua, data berasal dari satu desa sehingga hasil tidak dapat digeneralisasi langsung ke seluruh Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ketiga, penelitian tidak menggunakan wawancara untuk menjelaskan penyebab perubahan anggaran dan realisasi. Keempat, komposisi belanja per bidang tidak dianalisis sehingga hubungan antara realisasi dan prioritas pembangunan belum dapat diuji. Keterbatasan ini sekaligus menjadi agenda bagi penelitian berikutnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pengelolaan ADD Pemerintah Desa Hesang selama 2019-2022 mengalami perbaikan nyata pada dimensi efektivitas realisasi. Rasio efektivitas meningkat dari 78,23% pada 2019 menjadi 86,07% pada 2020, 92,54% pada 2021, dan 99,72% pada 2022. Berdasarkan kriteria yang digunakan, hasil tahunan bergerak dari kurang efektif, cukup efektif, kemudian efektif selama dua tahun terakhir. Rata-rata efektivitas sebesar 89,14% dan efektivitas agregat sebesar 89,63% menempatkan keseluruhan periode pada kategori cukup efektif, tetapi dengan tren yang sangat positif. Penurunan selisih anggaran dan realisasi dari Rp203.369.000 menjadi Rp2.814.050 memperkuat bukti membaiknya kemampuan penyerapan.

Pada dimensi pertumbuhan, kinerja keuangan bersifat fluktuatif. Pendapatan ADD tumbuh 2,86% pada 2020 dan 47,69% pada 2021, kemudian menurun 30,48% pada 2022. Belanja tumbuh 13,17% dan 58,82% pada 2020-2021, kemudian turun 25,09% pada 2022. Dengan demikian, pendapatan dan belanja tidak tumbuh positif sepanjang periode. Kontraksi 2022 menunjukkan berkurangnya kapasitas fiskal, tetapi tidak menurunkan efektivitas karena realisasi tetap sangat dekat dengan anggaran. Temuan ini menegaskan bahwa pertumbuhan anggaran dan efektivitas pelaksanaan harus dievaluasi sebagai dua dimensi yang berbeda.

Pemerintah Desa Hesang disarankan mempertahankan ketepatan realisasi melalui perencanaan berbasis kebutuhan, jadwal pelaksanaan yang realistis, pemantauan berkala, dan keterbukaan informasi berbasis hasil. Pengembangan BUM Desa dan sumber pendapatan asli desa perlu dilakukan secara profesional untuk memperkuat kesinambungan pembiayaan. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek ke beberapa desa, menambahkan rasio efisiensi, kemandirian, keserasian dan varians, serta mengombinasikan analisis dokumen dengan wawancara dan penilaian dampak program. Dengan pendekatan tersebut, evaluasi kinerja tidak hanya menunjukkan seberapa besar anggaran direalisasikan, tetapi juga seberapa berkualitas manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliana, R. (2017). Pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan good governance [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta].
- Athoillah, A. (2013). Dasar-dasar manajemen. CV Pustaka Setia.
- Fahmi, I. (2014). Manajemen: Teori, kasus, dan solusi. Alfabeta.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis rasio keuangan untuk penilaian kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Jurnal EBBANK, 8(1).
- Halim, A. (2014). Akuntansi keuangan daerah: Akuntansi sektor publik (Edisi ke-4). Salemba Empat.
- Hery. (2014). Analisis laporan keuangan. PT Bumi Aksara.
- Jumingan. (2014). Analisis laporan keuangan. PT Bumi Aksara.
- Kasmir. (2011). Analisis laporan keuangan. PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2013). Pengantar manajemen keuangan. Kencana.
- Lili, M. A. (2018). Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar. Artikel Ilmiah.
- Machmud, M., Kawung, G., & Rompas, W. (2014). Analisis kinerja keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2007-2012. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 14(2).
- Mahsun, M. (2016). Pengukuran kinerja sektor publik. BPFE.
- Mutiha, A. H. (2016). Analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun anggaran 2010-2014. Jurnal Vokasi Indonesia, 4(2).
- Pemerintah Desa Hesang. (2023). Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta realisasi Alokasi Dana Desa tahun 2019-2022 [Dokumen tidak dipublikasikan].
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Ropa, M. O. (2016). Analisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal EMBA, 4(2).
- Sujarweni, V. W. (2017). Manajemen keuangan: Teori, aplikasi, dan hasil penelitian. Pustaka Baru Press.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.